

**ANALISIS *FRAMING* ROBERT ENTMAN PADA PEMBERITAAN KPK VS
POLRI JILID III
(Studi Kasus pada Koran Tempo dan Media Indonesia Periode Januari
sampai dengan Juni 2015)**

Muhamad Hidayat

*Universitas Mercu Buana Jakarta
hidayatanwar77@gmail.com*

Abstract: Conflict between KPK and Polri, from volume I to III is not free from the influence of mass media coverage. Mass media has a very important role in which it conducts the search, processing and dissemination of data and information dispute between KPK and Polri. Media has also an interest in disseminating the news so that it can lead public opinion based on the media ideology. Media hegemony also happens because the media has become a power to get public opinion. The objects of the research are Media Indonesia and Koran Tempo which will be analyzed by framing Robert Entman concept. Definition of problem, source of problem, moral decision, problem solving become the purposes of this research. The research method used qualitative descriptive and the analytical unit is the news of Koran Tempo and Media Indonesia in the period of January to June 2015. The result of the research indicated that there was difference of news projection done by Koran Tempo and Media Indonesia. Koran Tempo shows more about Budi Gunawan and President Joko Widodo as the cause of the problem. Media Indonesia shows more the performance of the KPK in carrying out its duties violate the procedures or regulations.

Keywords: Mass Media, Public Opinion, Framing

Abstrak: Konflik yang terjadi antara KPK dan Polri, dari jilid I hingga III ini tidak terlepas dari pengaruh pemberitaan media massa. Media massa sangat berperan penting sebagai wadah yang melakukan pencarian, pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi perseteruan antara KPK dan Polri. Media juga memiliki kepentingan dalam menyebarluaskan berita sehingga dapat mengiring opini publik yang didasari ideologi media tersebut. Dalam menjalankan ideologi media juga tidak jarang melakukan hegemoni karena saat ini media telah menjadi kekuatan untuk memenangkan opini publik. Adapun yang menjadi objek peneliti ialah Media Indonesia dan Koran Tempo dan akan dianalisis dengan konsep *framing* Robert Entman. Definisi masalah, sumber masalah, keputusan moral, penyelesaian masalah menjadi tujuan dari penelitian ini. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan unit analisis ialah berita Koran Tempo dan Media Indonesia pada periode Januari sampai dengan Juni 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan penonjolan pemberitaan yang dilakukan oleh Koran Tempo dan Media Indonesia. Koran Tempo lebih memperlihatkan permasalahan Budi Gunawan dan Presiden Joko Widodo sebagai penyebab masalah. Media Indonesia lebih memperlihatkan kinerja KPK yang dalam menjalankan tugasnya melanggar prosedur atau peraturan.

Kata kunci: Media Massa, Opini Publik, *Framing*

PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap dibiarkan berlangsung, cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris

masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. (Kemendikbud, 2011).

Hasil survei dari *Transparency International* maupun *Transparency International Indonesia* memperlihatkan bahwa korupsi di Indonesia sudah memasuki fase gawat darurat korupsi. Menurut Croall (2001:13), korupsi merupakan kejahatan yang kompleks dan sulit dibuktikan, karena tersamarnya para pelaku dan juga korban. Hampir semua kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan penting di berbagai instansi pemerintah, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan dilakukan secara rapi dan sistematis. Sedangkan menurut Lemert (2001:23) korupsi merupakan *organized crime*, yaitu suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sistematis. Korupsi dapat diibaratkan seperti gunung es, dimana tindak pidana atas kejahatan korupsi ada di permukaan air, namun akar permasalahan tidak pernah tersentuh hukum. Hal ini merupakan kerawanan korupsi (*corruption hazard*) dan berpotensi menjadikan korupsi menjadi kejahatan yang terus ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini (Rianto, 2009:10). Salah satu lembaga yang menangani korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK sebagai lembaga independen lahir pada tahun 2003 yang dibentuk berdasarkan UU No. 31 Tahun 2002.

Perjalanan panjang KPK memberantas korupsi di Indonesia tidak berjalan mulus. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya konflik antara KPK dan Polri yang dikenal dengan sebutan Cicak vs Buaya. Perseteruan Cicak vs Buaya bermula dari tindakan penyidikan (penyadapan) KPK terhadap Kabareskrim Polri di tahun 2008, terkait kasus Bank Century. Perseteruan KPK vs Polri berlanjut pada Juli 2012 terkait kasus korupsi di proyek simulator ujian SIM. Pada 2014 perseteruan KPK vs Polri memasuki jilid 3, yaitu sehubungan dengan dicalonkannya Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Konflik yang terjadi antara KPK dan Polri, dari jilid I hingga III ini tidak terlepas dari pengaruh pemberitaan media massa. Media massa sangat berperan penting sebagai wadah yang melakukan pencarian, pengolahan dan penyebarluasan data dan informasi perseteruan antara KPK dan Polri. Menurut Siebert, dalam bukunya *Four Theories of the Press* (Severin dan Tankard, 2008:374-384), media massa memiliki tanggung jawab terhadap pemberitaan yang dilakukan yaitu, media selain memberikan informasi, menghibur, mencari keuntungan, juga harus dapat memberikan individu hak untuk mengemukakan masalahnya dalam forum media. Jika media tidak dapat memenuhi kewajibannya, ada pihak yang harus memaksakannya (sistem pers tanggung jawab sosial). Hal ini berdasarkan dari dua pemberitaan berbeda dari dua media nasional yaitu Koran Tempo dan Media Indonesia. Pada awal perseteruan kedua lembaga tersebut terjadi dua pemberitaan yang sangat berbeda, pada tanggal 12 Januari 2015 judul pemberitaan Koran Tempo adalah "Istana Persilakan KPK Periksa Budi Gunawan", sedangkan Media Indonesia judul pemberitaannya ialah "Titip Rindu buat Kapolri Baru". Menyadari bahwa pemberitaan tidak lepas dari kepentingan internal maupun eksternal, menjadi hal yang menarik untuk meneliti bagaimana Media Indonesia dan Koran Tempo melakukan *framing* terhadap perseteruan KPK dan Polri terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Komunikasi Politik

Politik seperti komunikasi dimana politik melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Komunikasi

meliputi politik, apabila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Apabila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan, dan dipertukarkan melalui komunikasi. Pada hakikatnya politik merupakan kegiatan berkomunikasi antara orang-orang (Nimmo, 2005:9).

Komunikasi politik juga memperlihatkan keamatan hubungan antara komunikasi politik dan massa. Dalam pembahasannya, memperlihatkan peran komunikasi dalam tujuan politik dipengaruhi oleh kepentingan media massa, sebagai pembawa pesan ke dalam masyarakat.

Kepentingan politik akan berkembang dalam masyarakat, apabila komunikasi politik mampu memainkan peran komunikasi massa sebagai media politik dalam sistem dan tatanan kenegaraan yang positif dengan perilaku dan norma-norma politik yang objektif sesuai dengan tuntutan etika politik. (Burgoon, 1982:757).

Proses politik menuntut agar individu bertindak secara kolektif dalam membuat keputusan tentang siapa yang akan memimpin mereka. Opini politik pribadi dari individu menjadi opini publik rakyat keseluruhan, yang bisa tercermin dari pola pemilihan dan diperlakukan sebagai saran bagi para pemimpin politik yang ada. Menurut Habermas, opini publik disebut juga dengan ruang publik. Ruang publik merupakan ranah kehidupan sosial kita yang di situ dapat terbentuk sesuatu yang mendekati opini publik. Warga berperilaku sebagai sebuah lembaga publik ketika mereka berunding dengan cara yang tidak dibatasi. Ruang publik merupakan tempat kebebasan berkumpul dan berserikat dalam mengemukakan dan mempublikasikan pendapat (McNair, 2016:26).

Sistem Pers

Menurut Schramm, pers merupakan media massa yang berfungsi menyalurkan dan memperlancar sampainya pesan komunikasi kepada komunikan atau khalayak. Memperlancar dalam arti mempermudah permainan khalayak, baik dari segi pengertiannya maupun perolehannya. Dalam hal ini, pers berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang menerjemahkan pesan komunikasi yang bisa dipahami komunikasinya. Penerapannya dalam kehidupan masyarakat, pers membawa fungsi informatif dan interpretatif mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, sebagai alat kehidupan sehari-hari, sebagai penghibur, sebagai alat untuk mempertahankan *prestise* sosial, dan sebagai penghubung dalam pengertian untuk mempertahankan kehidupan dimana ukuran moral terus berkembang (Suhandang, 96:2004). Pers adalah institusi sosial, sebagai lembaga kemasyarakatan pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian, pers tidaklah hidup secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh lembaga kemasyarakatan lain.

Salah satu ciri utama dari sistem pers otoriter adalah fungsi pers sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Melalui penerapan hak khusus, lisensi, sensor langsung dan peraturan organisasi media, individu dijauhkan dari kemungkinan mengkritik pemerintah yang berkuasa. Dalam sistem otoriter, pers dapat dimiliki baik publik maupun perorangan, namun tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan pemerintah (Siebert, 1986; Yin, 2008; Severin & Tankard, 2008:374).

Sistem Pers Otoriter

Sistem ini merupakan suatu bentuk perlawanan dari pandangan otoriter. Pers berfungsi untuk membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah sekaligus sebagai media yang memberikan informasi, menghibur, dan mencari keuntungan. Penguasa tidak memiliki hak untuk mengatur isi berita media. Penguasa dalam sistem ini juga tidak berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menerbitkan media. Pada sistem ini

siapapun sebenarnya memiliki hak untuk menerbitkan media asalkan mempunyai kemampuan ekonomis. Tidak ada izin atau lisensi khusus untuk menerbitkan media. Apa yang baik dan tidak baik tidak ditentukan oleh penguasa, tetapi ditentukan oleh khalayak. Dalam sistem ini, penguasa tidak mempunyai hak untuk menutup (bredel) media (Siebert, 1986; Yin, 2008; Severin & Tankard, 2009;374-377).

Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial

Pengembangan dari sistem liberal menghasilkan sistem tanggung jawab sosial, yang dikembangkan pada abad ke-20 di Amerika Serikat. Media selain bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, mencari keuntungan, juga harus dapat memberikan individu hak untuk mengemukakan masalahnya di dalam forum media. Apabila media tidak dapat memenuhi kewajibannya, ada pihak yang harus memaksakannya. Dibawah sistem ini, media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode etik professional, dan dalam hal penyiaran, dikontrol oleh badan pengatur penyiaran. Pendorong utama dari teori ini adalah tumbuhnya kesadaran bahwa sistem liberal telah gagal untuk memenuhi janji dalam penggunaan kebebasan pers secara bertanggung jawab. Secara khusus, perkembangan teknologi dan industri media telah menyebabkan kurangnya kesempatan akses bagi individu maupun kelompok, serta rendahnya prestasi dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi, sosial dan moral bagi masyarakat. Sistem liberal dianggap hanya meningkatkan kekuasaan kelas tertentu (Siebert, 1986; Yin, 2008; Severin & Tankard, 2008:379).

Sistem Pers Totaliter

Teori ini dikembangkan berdasarkan ideologi Marxis dan nilai kebersamaan antar kelas maupun antar partai/golongan. Selama kelas kapitalis mengawasi fasilitas fisik media, kelas buruh tidak akan mempunyai akses pada saluran komunikasi. Kebebasan pers yang sebenarnya akan ada dalam masyarakat tanpa kelas. Kebebasan pada sistem ini adalah bebas dari kapitalisme, individualism, borjuasi, dan bukan bebas untuk menyatakan pendapat (Yin, 2008; Severin dan Tankard, 2008:380).

Soviet berpandangan bahwa tujuan utama media adalah membantu keberhasilan dan kelangsungan sistem Soviet. Media dikontrol oleh tindakan ekonomi dan politik dari pemerintah dan badan pengawas, dan hanya anggota partai yang loyal dan anggota partai ortodoks saja yang dapat menggunakan media secara regular. Media dalam sistem Soviet dimiliki dan dikontrol oleh negara dan hanya sebagai kepanjangan tangan negara.

Opini Publik

Menurut Irish dan Prothro bahwa opini publik merupakan suatu ekspresi sikap mengenai persoalan masyarakat. Definisi tersebut mencakup tiga aspek yaitu: (1) ekspresi, (2) persoalan (*issue*), (3) kemasyarakatan (Soemirat & Ardianto, 2002:106).

Opini publik didefinisikan oleh Noelle Neumann dalam (Morisson, 2008: 72) adalah sebagai berikut: "*Public opinions are attitude or behaviors one must express in public if one is not to isolate oneself; in areas of controversy of change, public opinions are those attitude one can express without running the danger of isolated oneself*". Opini publik merupakan suatu sikap yang dipertunjukkan oleh seseorang kepada khalayaknya jika ia tidak ingin dirinya terisolasi, dalam area kontroversi opini publik merupakan sikap yang ditunjukkan seorang kepada khalayak tanpa harus membahayakan dirinya sendiri yang berupa pengucilan.

Framing Robert Entman

Framing memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik karena *framing* memainkan peran utama dalam mendesak kekuasaan politik. *Frame* dalam teks berita

sebenarnya merupakan kekuasaan yang tercetak, ia menunjukkan identitas para aktor atau interest yang berkompetisi untuk mendominasi teks. Konsep *framing* menurut Entman, secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap *the power of a communication text*. *Framing analysis* dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, *news report*, atau novel. Robert N. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam *framing* berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawan akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan juga dibuang. Dibalik semua itu, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita.

Framing, secara esensial meliputi penseleksian dan penonjolan. Membuat *frame* adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral, dana atau merekomendasikan penanganannya.

Entman melihat sebuah *framing* yang digunakan oleh media dengan dua pendekatan, yaitu: 1. Seleksi isu: Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan; 2. Penonjolan aspek tertentu dari isu: Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan pada khalayak.

Analisis penelitian ini menggunakan model Robert N. Entman yang mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing*: *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (sumber masalah), *make a moral judgement* (keputusan), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan bukan dalam bentuk angka namun bentuk wawancara, studi dokumen, catatan, dan observasi pengamatan. Melalui pendekatan ini, dapat menjelaskan fenomena yang terjadi secara mendalam. Oleh karena itu penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk membandingkan realita yang ada dengan teori yang berkaitan (Moleong, 2004:131).

Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.

Data primer dari penelitian ini diambil dari teks-teks berita seputar perseteruan KPK vs Polri Jilid III pada Koran Media Indonesia dan Koran Tempo periode Januari sampai dengan Juni 2015. Sebagai data sekunder, peneliti juga melakukan tinjauan pustaka untuk memperkuat data primer.

Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* dengan model Robert Entman untuk mengetahui bagaimana Media Indonesia dan Koran Tempo membingkai perseteruan KPK vs Polri Jilid III pada periode Januari sampai dengan Juni 2015.

Dalam pendekatan ini, Robert Entman membagi empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing*: pendefinisian *masalah (define problem)*, sumber

masalah (*diagnose causes*), keputusan (*make a moral judgement*), menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis isi terhadap pemberitaan Koran Tempo periode Januari sampai dengan Juni 2015 yang terkait dengan perseteruan KPK vs Polri, ditemukan berupa topik yang sering diangkat oleh Koran Tempo dengan total pemberitaan sebanyak 33, dan pemberitaan terbanyak mengenai Presiden Jokowi dengan jumlah 15 pemberitaan. Hal ini tentunya cukup mengherankan, karena perseteruan pemberitaan yang dibahas mengenai KPK vs Polri, namun dominasi isi pemberitaan justru lebih mengenai Presiden Jokowi. Adapun isi pemberitaan ialah terdiri dari 10 pemberitaan cenderung negatif yang menyudutkan Presiden Jokowi, sedangkan 5 berita lainnya bersifat positif. Sedangkan jumlah pemberitaan kedua terbanyak ialah mengenai Institusi Polri sebanyak 13 pemberitaan. Koran Tempo mengangkat semua pemberitaan mengenai Institusi Polri yang cenderung negatif.

Berdasarkan hasil analisis isi terhadap pemberitaan Media Indonesia periode Januari sampai dengan Juni 2015 yang terkait dengan perseteruan KPK vs Polri, diambil 31 pemberitaan untuk diteliti. Pemberitaan terbanyak mengenai KPK, dengan total pemberitaan 20, terdiri dari 20 pemberitaan negatif. Pemberitaan terbanyak kedua tentang Institusi Polri dengan jumlah 8 pemberitaan, dengan jumlah 8 pemberitaan positif. Sedangkan pemberitaan tentang presiden terdapat 3 pemberitaan, dengan 3 pemberitaan positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan melalui studi kepustakaan mengenai analisis *framing* Robert Entman dalam perseteruan KPK vs POLRI Jilid III pada Koran Tempo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah). Yang ditonjolkan oleh Koran Tempo tidak hanya berfokus pada kasus Budi Gunawan, namun Koran Tempo melakukan pembingkai bahwa POLRI menjadikan tersangka semua pimpinan KPK.
2. *Diagnose causes* (Memperkirakan masalah atau sumber masalah). Koran Tempo juga dalam beberapa pemberitaannya menjadikan Presiden Joko Widodo sebagai sumber masalah (*diagnoses causes*) karena tidak tegasnya Presiden Joko Widodo menyelesaikan perseteruan dua lembaga Negara. Koran Tempo dengan gaya investigasinya menjadikan presiden sebagai objek utama pemberitaan. Hal ini dilihat dari jumlah pemberitaan tentang presiden lebih banyak dari pada pemberitaan lembaga KPK dan POLRI yang sedang berseteru.
3. *Make moral judgement* (Membuat keputusan moral). Setelah keputusan pra peradilan yang diputuskan oleh hakim, Koran Tempo dengan bahasa yang tegas tetap mendukung lembaga antirasuah (KPK). Hal ini dibuktikan dengan Koran Tempo membingkai membuat keputusan moral (*Make Moral Judgement*) dengan penonjolan berita polisi membalas dendam kepada KPK melalui para penyidik yang menangani kasus Budi Gunawan. Para penyidik dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian karena keputusan pra peradilan yang memenangkan Budi Gunawan.
4. *Treatment recommendation* (Menekankan penyelesaian). Penyelesaian masalah yang dibingkai oleh Koran tempo ialah dorongan dari Tim 9 yang meminta Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Sedangkan di sisi lain, dalam pemberitaan Media Indonesia pbingkaiannya adalah sebagai berikut:

1. *Problems* (Pendefinisian masalah). Yang ditekankan oleh Media Indonesia dalam pemberitaan ialah bahwa Polri tidak melakukan tindakan perlawanan terhadap KPK, namun Polri melayangkan pra peradilan yang merupakan salah satu bentuk kritik terhadap lembaga KPK. Hal ini dikarenakan dalam penetapan kriteria tersangka banyak terjadi kesalahan yang dilakukan KPK, salah satunya dokumen pemeriksaan Budi Gunawan.
2. *Diagnose causes* (Memperkirakan masalah atau sumber masalah). Dalam pemberitaan perseteruan KPK VS POLRI yang dibingkai oleh Media Indonesia ialah KPK yang dalam menjalankan tugas penanganan kasus tidak sesuai dengan aturan.
3. *Make moral judgement* (Membuat keputusan moral). Membingkai dalam perseteruan KPK VS POLRI Jilid III dalam penilaian moral, lembaga KPK harus kembali ke cara yang benar dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Selama ini KPK melanggar prosedur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam penetapan tersangka kasus korupsi. Sedangkan penilaian moral yang dilakukan Media Indonesia terhadap Budi Gunawan yang sejatinya adalah Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia lebih kearah pemberitaan yang positif.
4. *Treatment recommendation* (Menekankan penyelesaian). Dalam perseteruan KPK vs POLRI ialah kasus yang diselidiki oleh KPK tentang dugaan korupsi Budi Gunawan merupakan kasus yang tidak sah. Dalam sidang pra peradilan telah dinyatakan bahwa Budi Gunawan tidak bersalah.

Adapun saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini, yaitu:

Media mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi isi sebuah pemberitaan. Salah satu faktor terbesar ialah ideologi suatu media tersebut. Ideologi media tak terlepas dari ideologi yang dipahami oleh pemilik media. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat untuk lebih kritis dan menyaring informasi yang dimuat oleh media massa.

Media seharusnya menjadi alat kontrol sosial, dalam menyajikan berita ke khalayak tidak hanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh media tersebut. Setiap pemberitaan yang dikeluarkan, seyogyanya media massa mempunyai tanggung jawab moral karena dapat melakukan pembentukan opini publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Sobur. 2001. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika dan Analisis Framing*, Remadja Karya. Bandung.
- Alifahmi, Hifni. 2010. "Media Framing sebagai Strategi Public Relations". Coverage: Journal of Strategic Communication. Vol. 1 No.1, September. Depok: Fakultas Komunikasi Universitas Pancasila, pp. 11-32.
- Batubara, L. Sabam.(2008). *Menegakkan Kemerdekaan Pers*. Dewan Pers
- Burhan Bungin. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Cangara, Hafied. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Effendy, Onong Uchjana. 2001. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Eriyanto., 2002. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Edy, Susilo M. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, FISIP UPN Yogyakarta.
- Eriyanto. 2007. *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, -----
-----Yogyakarta : LKIS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit
- Jalaludin Rahmat. 2000. *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, Deny, N. 1999. "Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi"
Jurnal
Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol III/April 1999, Jakarta: IKSI dan ROSDA.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. (2012). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- McQuail, Denis. 2005. *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong, J Lexy. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya
- Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi. 2001. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi Cetakan 1*. Kemendikbud
- Ratna, Nyoman Ktha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shah, D.V., McLeod, D.M., Gotlieb, M.R., and Lee, N. *Framing and Agenda Setting*. In R. Nabi & M.B. Oliver (Eds.), *The SAGE Handbook of Media Processes and Effects* (pp. 83-98). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Severin, Werner, J dan Tankard, James, Jr. (2008). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Severin, W.,J., Tankard, J. 2008. *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Shoemaker, Pamela J., & Stephen D. Reese. (1996). *Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content*, London: Pearson Longman

Suhandang, Kustadi.2004. *Pengantar Jurnalistik*. Nuansa. Bandung

Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

TEMPO. 2013. *Tak Lekang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Veeger, K.J. 1993. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: Gramedia

William L Rivers, et al. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern Edisi Kedua*

Yuwono, Ismantoro. 2015. *Bocor-Bocor Duit Negara*. Media Pressindo. Yogyakarta